

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sektor pertanian yang luas sebagian besar wilayah digunakan dan dimanfaatkan untuk pertanian. Indonesia memiliki wilayah tropis yang baik menjadikan pertanian sebagai sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan. Negara Indonesia dijuluki sebagai negara agraris hal ini disebabkan oleh sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani. Sektor pertanian sebagai poros pembangunan Indonesia hal ini terlihat dari pembentukan produk domestik bruto, penyerapan tenaga kerja, penerimaan devisa, penyediaan bahan baku industri dan penyediaan pangan. Pertanian juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemerataan pembangunan yang didalamnya termasuk upaya pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sektor pertanian sendiri memiliki lima sub sektor diantaranya tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Produk pertanian yang paling menonjol di Indonesia yakni beras. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada tahun 2021 provinsi Jawa Timur menjadi provinsi penghasil padi terbesar yakni mampu memproduksi padi sebanyak 9,90 juta ton gabah kering giling. Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi kedua yang mampu memproduksi padi sebanyak 9,76 juta ton gabah kering giling. Produksi padi yang ada di Jawa Tengah mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 9,48 juta ton gabah kering giling.

Melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah disektor pertanian tentunya akan menjadi keuntungan besar bagi pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menganggarkan untuk membantu petani di bagian pupuk. Pupuk menjadi salah satu aspek penting dalam pertanian karena dengan pupuk tanaman pertanian maupun perkebunan dapat tumbuh dengan baik. Pemberian pupuk bersubsidi bermaksud untuk mendukung pemerintah dalam upaya membentuk ketahanan pangan nasional. Pembagian pupuk bersubsidi kepada petani harus memenuhi enam prinsip

utama yang sudah disusun. Keenam prinsip tersebut diantaranya tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Pengawasan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi terus dilakukan kementerian pertanian bersama pemerintah daerah agar pupuk yang didistribusikan sampai kepada petani. Pupuk menjadi aspek yang sangat penting maka tidak dipungkiri bahwasannya pupuk yang terjual terkadang melebihi kuota yang telah ditetapkan sehingga ada kekosongan stok di toko maupun kios, ini menjadikan pupuk langka di pasaran meskipun ada maka harganya mahal. Mahalnya pupuk mengakibatkan banyak petani mengalami kerugian karena pengeluaran lebih besar daripada keuntungan yang mereka dapatkan.

Kelangkaan ini terjadi karena kebutuhan yang tinggi dari petani tidak dibarengi dengan ketersediaan pupuk ditingkat pengecer. Kemahalan harga pupuk merupakan dampak dari langkanya pupuk yang ada dipasaran karena seringkali petani membeli pupuk melebihi batas maksimum yang dianjurkan pemerintah. Melihat fenomena ini tentunya pemerintah tidak tinggal diam salah satu cara yang ditempuh yakni mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Untuk menekan kerugian petani akibat pendistribusian pupuk yang tidak sesuai dengan kuota yang dibutuhkan maka pemerintah memberikan solusi dengan meluncurkan kartu tani. Kartu tani merupakan salah satu produk program pemerintah yakni dalam hal ini Kementerian Pertanian sebagai wujud kepedulian kepada petani. Undang – Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi dasar terbentuknya kartu tani. Kartu tani pertama kali diperkenalkan tahun 2017 oleh Menteri Pertanian Andi Amran di Sumenep namun berlaku secara efektif di Januari 2021 dibawah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pada tahun 2019 kartu tani dilakukan uji coba dibeberapa daerah yakni di Sumenep, Ciamis, Lumajang, Lamongan, Kulon Progo, Tegal dan Bogor.

Kegunaan dari kartu tani tersebut salah satunya untuk mendata dan menyusun kebutuhan petani akan pupuk sehingga diharapkan tidak akan lagi

kelangkaan pupuk di kios dan pengecer. Petani yang tergabung dalam kelompok tani akan menyusun rencana definitif kelompok dan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Nama petani yang termasuk dalam RDKK akan secara otomatis menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan. Pupuk bersubsidi dengan penggunaan kartu tani merupakan hal baru bagi petani sehingga perlu adanya penyesuaian. Karena petani sudah sejak lama menggunakan cara lama untuk memperoleh pupuk di toko maupun kios. Kegunaan kartu tani sama halnya dengan kartu ATM yang biasa digunakan oleh masyarakat sehari – hari, namun letak perbedaannya kartu tani tidak bisa digunakan disembarang tempat ada alat khusus untuk menggunakan kartu tani tersebut. Penggunaan kartu tani hanya bisa dilakukan ditempat penebusan pupuk bersubsidi dalam hal ini adalah kios atau pengecer resmi.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang melalui penyuluh pertanian yang tersebar di seluruh kecamatan perlu mengambil peran. Penyuluh pertanian sebagai pelaksana teknis dari program – program yang dijalankan pemerintah. Penyuluh pertanian termasuk dalam penghubung komunikasi dari petani kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Keberhasilan sebuah program tidak lepas dari peran orang – orang yang berada didalamnya. Melihat fenomena yang terjadi di lingkungan petani yang berada di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang maka dari itu penyuluh pertanian perlu mengambil peran dalam mendampingi para petani untuk memahami dan mengerti tentang pendistribusian pupuk bersubsidi yang menggunakan mekanisme baru yakni dengan menggunakan kartu tani. Kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi bagi petani diharapkan dapat mempermudah perolehan pupuk dari pemerintah. Berlakunya penggunaan kartu tani dengan harapan pendistribusian pupuk bersubsidi tepat sasaran dan tidak ada keluhan bagi petani tentang kelangkaan pupuk.

Peran penyuluh disini sebagai jembatan komunikasi antara petani dan pemerintah diharapkan dapat memberikan pendampingan secara optimal. Penyuluh pertanian harus berperan aktif dalam memberikan penyuluhan dan

edukasi di sektor pertanian. Perolehan pupuk bersubsidi pada saat ini kuota perolehan pupuknya harus berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan RDKK yang telah dilakukan bersama – sama kelompok tani dengan didampingi oleh penyuluh pertanian untuk jatah pupuk selama satu tahun kedepan. Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran penyuluh pertanian. Sesuai permasalahan yang ditemukan oleh peneliti maka untuk penelitian ini mengangkat judul “Peran Penyuluh Pertanian Dalam Implementasi Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti yakni:

1. Bagaimana peran penyuluh pertanian dalam implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana implementasi program kartu tani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penyuluh pertanian dalam implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang serta untuk mengetahui implementasi program kartu tani di lapangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai peran penyuluh pertanian dalam implementasi pendistribusian pupuk bersubsidi melalui kartu tani serta menambah pengetahuan mengenai implementai program kartu tani.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk kajian ilmu dan pengembangan pengetahuan. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan perbandingan penelitian sejenis dimasa yang akan datang. Khususnya mengenai peran penyuluh pertanian dan implementasi program kartu tani.

